

**KOMUNIKASI STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
(Studi Kasus pada Pengeluaran Putusan Kebijakan Pencabutan Izin dan
Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia)**

VERA ISMUDIARTI

ABSTRAK

Dilatarbelakangi oleh keinginan peneliti dalam mengetahui bagaimana proses komunikasi strategis yang dilakukan dalam pengeluaran sebuah putusan kebijakan, penelitian ini membahas tentang bagaimana Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) menjalankan komunikasi strategis dalam pengeluaran putusan kebijakan pencabutan izin dan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil temuan yang didapat adalah mengingat kasus ormas HTI ini termaksud dalam permasalahan bertaraf nasional karena ideologi negara Indonesia yang terancam, dalam pelaksanaan proses komunikasi strategis pada saat pengeluaran putusan kebijakan pencabutan izin dan pembubaran ormas HTI terdapat aktor-aktor yang ikut terlibat, dalam kasus ini tidak hanya Kemenkumham saja tetapi terdapat berbagai lembaga negara lainnya yakni dari lembaga tertinggi negara yaitu Presiden sampai dengan masyarakat. Pada pelaksanaan komunikasi strategis, Koordinasi, pengkajian, dan sinergitas adalah kunci utamanya. Komunikasi strategis yang dilakukan dalam menangani kasus ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mencapai hasil keputusan dan kesepakatan bersama demi melindungi persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Komunika s Strategis, Putusan Kebijakan, Koordinasi, Pengkajian, Sinergitas, Indonesia, Kemenkumham, HTI

**STRATEGIC COMMUNICATION OF THE INDONESIAN MINISTRY OF
LAW AND HUMAN RIGHTS**

*(The Case Study on The Issuance of The Policy Decision on The Revocation of
Licenses and Dissolution of the Hizbut Tahrir Indonesian Community
Organization)*

VERA ISMUDIARTI

ABSTRACT

This research is motivated by the researcher's desire to know how strategic communication process carried out in the issuance of the policy decisions, this study discusses how Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights carry out strategic communication carried out in the issuance of the policy decisions in revocation of licenses and dissolution of the Hizbut Tahrir Indonesian community organization. This research is a qualitative study and uses a case study research method. Data collection techniques used are through in-depth interviews and document. As a result, considering the case of HTI organizations referred to in national issues each because Indonesia's ideology is threatened, in the implementation of strategic communication process carried out in the issuance of the policy decisions in revocation of licenses and dissolution there are actors involved, in this case it is not just Ministry of Law and Human Rights but there are various other state institutions, namely from the highest state institutions, namely the President to the community. In the implementation of strategic communication, coordination, assessment and synergy are the main keys. Strategic communication carried out in handling this case has the main objective, to achieve the results of a joint decision and agreement to protect the unity and unity of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Strategic Communication, Policy Decisions, Coordination, Assessment, Synergy, Indonesia, Kemenkumham, HTI*